

BAB III

TANTANGAN KEAMANAN PADA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

3.1 Ancaman Keamanan Maritim Tradisional di Perairan Indonesia

Dalam menjalankan negara yang aman dan berdaulat, tentu lah negara akan berusaha untuk melindungi wilayahnya dari seluruh ancaman yang berpotensi untuk mengganggu kedaulatan juga keamanan wilayahnya. Salah satu ancaman keamanan yang cukup mendapatkan perhatian besar adalah ancaman keamanan maritim. Ancaman keamanan maritim sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni ancaman tradisional dan non-tradisional. Indonesia, sebagai negara kepulauan memiliki ancaman yang lebih besar terkait dengan keamanan maritim ini karena wilayahnya yang terbagi-bagi dalam beberapa pulau sehingga memungkinkan untuk terancam dalam berbagai aspek.

Divine D⁹⁸ menjelaskan bahwa keamanan maritim sangat penting dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Ancaman terhadap keamanan maritim bervariasi dari satu negara ke negara lain. Istilah ini mencakup aspek dan persoalan yang timbul dari lautan di sekitar suatu negara yang mengancam kepentingan nasionalnya. Ancaman tradisional sendiri dapat diartikan sebagai ancaman militer yang dihadapi suatu negara dari negara lain yang berdampak negatif terhadap

⁹⁸ Divine D, *Explained: Traditional and Non-Traditional Threats of Maritime Security* di akses dari <https://www.indiatimes.com/explainers/news/explained-traditional-and-non-traditional-threats-of-maritime-security-604842.html> pada 2 Februari 2024 pukul 11:14

kedaulatan, integritas, perdagangan, dan lain-lain. Sejatinya, ancaman tradisional hanya berdampak kepada negara saja.

Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, ancaman militer tradisional yang sangat mendapatkan perhatian adalah sengketa wilayah. Indonesia telah beberapa kali terlibat di dalam sengketa wilayah dengan negara lain dan adanya klaim atas wilayah Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Sengketa wilayah ini tentu saja akan merugikan Indonesia juga menempatkan kedaulatan Indonesia di dalam situasi yang berbahaya. Dengan demikian, dalam ancaman keamanan maritim tradisional, permasalahan sengketa wilayah telah menambah kompleksitas pada wilayah maritim Indonesia.

3.1.1 Ancaman Sengketa Wilayah di Perairan Indonesia

Abramson & Carte⁹⁹ menuliskan bahwa terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa sengketa wilayah secara fundamental telah membentuk hubungan di antara para negara. Sengketa wilayah sendiri merupakan sebuah perselisihan antara dua negara atau lebih mengenai negara mana yang mempunyai kedaulatan atas suatu bagian wilayah tertentu. Sengketa wilayah disendiri memiliki dua klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi yang pertama adalah sengketa wilayah tertentu menyangkut keseluruhan wilayah suatu negara sehingga menimbulkan tantangan terhadap eksistensi negara tersebut. Klasifikasi yang kedua adalah sengketa wilayah yang hanya berdampak pada sebagian wilayah dan menyangkut

⁹⁹ Scott F. Abramson & David B. Carter, 2016, *The Historical Origins of Territorial Disputes*, *The American Political Science Review*, Vol. 110, No. 4, Hal 675-698.

penempatan satu atau lebih batas yang membatasi wilayah di mana masing-masing negara menjalankan kedaulatannya.¹⁰⁰

Terjadinya sengketa wilayah ini sendiri dapat timbul dalam berbagai cara. Misalnya, sengketa wilayah dapat dipicu oleh upaya suatu negara untuk menaklukkan wilayah milik negara lain. Sengketa wilayah sering kali mengakibatkan ketegangan diplomatik, ekonomi, dan militer antara dua negara atau lebih. Tak hanya itu, sengketa wilayah juga acap kali menimbulkan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian mengenai negara mana yang mengontrol dan menjalankan wewenangnya atas wilayah yang disengketakan. Secara historis, sengketa wilayah sering kali berujung pada konflik bersenjata. Namun, banyak sengketa wilayah yang akhirnya diselesaikan secara damai, baik melalui perundingan mau pun melalui mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁰¹

Alasan yang kerap kali digunakan oleh para pemimpin negara di dalam klaim wilayah sehingga menyebabkan sengketa wilayah ini adalah berdasarkan preseden historis. Preseden historis ini sendiri merupakan klaim yang lebih mudah dibenarkan, baik secara internasional mau pun domestik. Secara umum, ketika batas-batas suatu negara berdekatan dengan preseden historis yang saling bersaing, maka hal ini memberikan peluang lebih besar bagi para pemimpin untuk membuat klaim. Setidaknya terdapat dua kemungkinan utama mengapa para pemimpin memiliki inisiatif untuk mengklaim wilayah di sepanjang preseden historis.

¹⁰⁰Curtis, *Territorial Disputes*, diakses dari <https://www.curtis.com/glossary/public-international-law/territorial-dispute> pada 2 Februari 2024 pukul 11:45.

¹⁰¹ Ibid.

Pertama, konsisten dengan pandangan konvensional, di mana adanya kemungkinan para pemimpin bersengketa di sepanjang batas-batas historis karena garis-garis ini secara sistematis terletak di wilayah yang bernilai bagi negara. Dengan demikian, para pemimpin terus mengejar wilayah yang sama dengan yang dicari oleh negara-negara secara historis karena letaknya yang strategis dan mengandung kekayaan yang berharga seperti cadangan bijih besi yang penting secara militer dan ekonomi. Kemungkinan kedua adalah bahwa preseden historis merupakan sumber insentif bagi para pemimpin yang mengklaim wilayah di sepanjang batas-batas tersebut.¹⁰²

Indonesia sendiri pernah dan sedang terlibat di dalam sengketa wilayah ini. Jika dilihat berdasarkan data yang ada, seperti misalnya dengan Malaysia, Timor Leste, Filipina, dan yang terbaru dengan Tiongkok. Sengketa wilayah ini sendiri disebabkan karena wilayah Indonesia yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Seperti wilayah Indonesia darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Dengan kondisi geografis seperti ini, membuat konflik sengketa wilayah terus terjadi dengan sengketa tapal batas atas wilayah perbatasan dengan potensi sumber daya alam yang besar merupakan salah satu masalah yang masih terjadi dan menjadi persoalan yang penting.¹⁰³

¹⁰²Op.cit Abramson & Carter, hal. 675-676.

¹⁰³Issha Harruma, *Sengketa-sengketa Perbatasan di Indonesia* di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150091/sengketa-sengketa-perbatasan-di-indonesia?page=all> pada 2 Februari 2024 pukul 12:30.

Sengketa wilayah Indonesia paling sering terjadi dengan Malaysia. Seperti misalnya sengketa wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan, Pulau Sebatik, dan Blok Ambalat.¹⁰⁴ Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia merupakan isu menahun yang belum mencapai titik selesai. Baik Indonesia dan Malaysia sama-sama berupaya untuk menjamin keutuhan dan kedaulatannya, terutama Indonesia yang berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua negara pun tidak akan mundur sejengkal pun dan menyerah terhadap permasalahan sengketa wilayah ini.¹⁰⁵ Karena panjangnya sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, maka konflik wilayah ini lah cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia.

Sengketa wilayah Indonesia dengan Malaysia ini, pada nyatanya tidak hanya satu-satunya sengketa wilayah yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Belakangan ini, isu sengketa wilayah antara Indonesia dan Tiongkok di Kepulauan Natuna dan klaim kepemilikan Tiongkok atas kepulauan tersebut melalui sembilan garis putus-putus atau *nine dashlinenya* juga telah menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Kepulauan Natuna merupakan pulau yang kaya akan minyak dan gas, dan Tiongkok menunjukkan sikap asertifnya terhadap klaim kepemilikan wilayah di Natuna. Namun, Indonesia bersikap tegas dan mengatakan bahwa wilayah landasan kontingen di Natuna masih sesuai dengan UNCLOS, yang

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Lemhannas, *FGD Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia*, diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2002-fgd-penyelesaian-sengketa-batas-laut-antara-indonesia-dan-malaysia> pada 2 Februari 2024 pukul 13:13.

mana hal ini menyatakan bahwa Natuna merupakan bagian dari wilayah Indonesia.¹⁰⁶

Sengketa wilayah yang terjadi di Natuna ini telah membawa dampak bagi Indonesia, di mana terancamnya kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara. Diskusi antara Indonesia dan Tiongkok ini sendiri tidak mendatangkan titik terang karena Indonesia yang menolak untuk mengakui ZEEI atas Laut Natuna Utara. Hal yang sebenarnya cukup menyulitkan Indonesia adalah kekuatan militer Tiongkok yang telah berkembang dengan sangat besar dan mengancam kedaulatan Indonesia dengan alutsista canggih yang dimiliki oleh Tiongkok. Sehingga, Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai di dalam melawan Tiongkok karena kemampuan militer Indonesia tidak berada di level yang sama dengan militer Tiongkok.¹⁰⁷

Sengketa di Laut Natuna saat ini tengah menjadi perhatian oleh Indonesia mengingat rentannya posisi Natuna saat ini. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai hal untuk menangkal dan mempertahankan Natuna dari klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia merumuskan strategi dan kebijakan luar negeri yang dianggap lebih efektif melalui cara-cara yang damai untuk mengatasi permasalahan ini. Pandangan Indonesia adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang ditetapkan dengan

¹⁰⁶ Aditya Jaya Iswara, *Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya*, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all> pada 2 Februari 2024 pukul 14:00.

¹⁰⁷ Bernadine Grace Alvania Manek, 2022, *Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara*, Jurnal Lemhannas RI, Vol. 11, No. 2, hal. 105-111.

menggunakan seluruh potensi sumber daya nasional dengan mempertimbangkan risiko dan biaya dari pelaksanaan strategi tersebut. Secara militer, tentu saja kekuatan militer Tiongkok lebih memumpuni dari pada Indonesia. Namun demikian, Tiongkok tak hendak membuka zona perang secara terbuka karena akan menimbulkan implikasi yang signifikan di panggung diplomasi internasional dan membuat mereka menanggung risiko finansial yang besar.¹⁰⁸ Oleh karena itu, strategi Indonesia ini dilakukan dengan melakukan penguatan kerja sama maritim dengan Tiongkok, di mana tujuan dari kerja sama ini adalah mengurangi ketegangan dan memungkinkan diskusi yang lebih konstruktif mengenai klaim teritorial, membangun kepercayaan melalui kerja sama untuk mengatasi masalah di Laut Natuna, hingga bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya maritim yang dianggap mampu untuk membuka peluang dalam penyelesaian yang saling menguntungkan dan mengurangi potensi konflik.¹⁰⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan rentan mengalami sengketa wilayah dengan negara lain, serta bagaimana negara lain menjadikan preseden historis untuk mengklaim wilayah Indonesia. Pada akhirnya, sengketa wilayah ini dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta tentunya Indonesia tidak ingin kembali menghadapi kehilangan wilayah seperti apa yang terjadi di Pulau Sipadan dan Ligitan atas konflik wilayah bersama dengan

¹⁰⁸ Boy Anugerah. *Penguatan Strategi Penangkalan dalam Merespons Aksi Koersif Cina di Laut Natuna Utara*, hal 286-307.

¹⁰⁹ Nico Daniel Pasaribu & Lukman Yudho Prakoso, 2023. *Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Respons Terhadap Sengketa di Wilayah Laut Cina Selatan*. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol. 9, No. 2, Hal 19-28.

Malaysia. Sengketa wilayah ini, jika Indonesia sampai kehilangan wilayahnya lagi, maka akan mendatangkan kerugian bagi pihak Indonesia. Sehingga, dalam kasus sengketa wilayah di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok ini, Indonesia harus mengatur strategi dengan sebaik mungkin untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Namun, perlindungan kedaulatan dan wilayah NKRI ini tidak hanya kepada Laut Natuna Utara saja, melainkan seluruh wilayah Indonesia, utamanya yang berbatasan baik secara daratan dan lautan dengan negara lain.

3.2 Ancaman Keamanan Maritim Non-Tradisional di Perairan Indonesia

Ancaman keamanan maritim tidak hanya berada di seputar ancaman tradisional saja. Dengan adanya globalisasi dan berbagai kepentingan yang muncul membuat ancaman keamanan maritim melebarkan sayapnya kepada ancaman keamanan maritim non-tradisional. Sejak awal milenium baru, lingkungan keamanan internasional telah berubah secara drastis. Risiko konflik bersenjata besar dan perang antar negara kini menurun, namun sebagai gantinya, dunia semakin dihadapkan dengan sejumlah tantangan keamanan yang bersifat non-militer. Tantangan keamanan yang bersifat non-militer ini sendiri seperti perompakan dan perampokan bersenjata, tindakan terorisme, penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal, hingga perusakan lingkungan utamanya lingkungan laut yang dilakukan dengan sengaja.

Ancaman-ancaman non-militer ini dianggap lebih parah dan lebih mungkin menimbulkan lebih banyak kerugian bagi banyak orang daripada ancaman konvensional seperti perang dan konflik antar negara. Pada gilirannya, dengan

adanya ancaman keamanan non-tradisional ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap sifat kerja sama keamanan di antara negara-negara, serta tata kelola global.¹¹⁰

Sebagaimana ancaman tradisional yang dapat berdampak kepada keamanan dan kedaulatan negara, maka ancaman non-tradisional juga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Sehingga porsi perhatian yang diberikan kepada ancaman non-tradisional haruslah sama dengan porsi yang diberikan kepada ancaman tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional tidak bisa disepelekan begitu saja karena akan merusak jika tidak ditangani dengan baik. Ancaman keamanan maritim non-tradisional ini juga mengintai dan mengancam keamanan Indonesia, utamanya di mana Indonesia memiliki banyak celah wilayah yang dapat digunakan oleh oknum untuk melakukan salah satu ancaman non-tradisional ini.

3.2.1 Ancaman Perompakan dan Perampokan Bersenjata di Perairan Indonesia

Piracy and armed robbery at sea atau perompakan dan perampokan bersenjata merupakan kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama seluruh umat manusia (*humanist generic host*) dan merupakan kejahatan tertua yang diakui secara internasional.¹¹¹ ReCAAP mendefinisikan perompakan merujuk kepada Pasal 101 dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yakni;

¹¹⁰ Mely Caballero-Anthony, 2016, *Non Traditional Security: Concept, Issues, and Implications on Security Governance*, Georgetown Journal of Asian Affairs, Vol. 3, No. 1, hal. 5-13.

¹¹¹ Gerald A. Bunga, 2020, *The Regulation of Piracy and Armed Robbery at Sea in International Law*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 3, hal. 425-449.

“(a) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang melanggar hukum, atau tindakan perampasan apa pun, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi, dan terarah: (i) di laut lepas, terhadap kapal lain, atau terhadap orang atau harta benda di atas kapal tersebut; (ii) terhadap kapal, orang atau harta benda di suatu tempat di luar yurisdiksi negara mana pun; (b) setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoperasian kapal atau pesawat udara dengan pengetahuan tentang fakta-fakta yang menjadikannya sebagai kapal atau pesawat udara bajak laut; dan (c) setiap tindakan menghasut atau dengan sengaja memfasilitasi suatu tindakan yang diuraikan dalam (a) atau (b).¹¹² Tindakan ini dapat disebut sebagai pembajakan atau perompakan jika terjadi di perairan internasional atau di luar yurisdiksi negara mana pun.”¹¹³

Sementara perampokan bersenjata terhadap kapal, sesuai dengan Kode Praktik untuk Investigasi Kejahatan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal dari International Maritime Organisation (IMO), didefinisikan sebagai, “(a) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau tindakan perampasan, atau ancaman, selain tindakan “pembajakan,” yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan ditujukan terhadap kapal, atau terhadap orang atau harta benda di atas kapal, di dalam perairan dalam negeri, perairan kepulauan dan laut teritorial suatu negara; (b) setiap tindakan menghasut atau dengan sengaja

¹¹²ReCAAP, *What is Piracy and Armed Robbery Against Ships and What Should You Do If You Encounter an Incident?*, di akses dari https://www.recaap.org/piracy_definitions_and_actions pada 3 Februari 2024 pukul 16:18.

¹¹³ Maritime Global Security, *Piracy*, di akses dari <https://www.maritimeglobalsecurity.org/riskissues/piracy/#:~:text=The%20act%20is%20referred%20to,territorial%20waters%20or%20internal%20waters> pada 3 Februari 2024 Pukul 16:21.

memfasilitasi tindakan yang telah disebutkan.”¹¹⁴ Sehingga, dapat dikatakan bahwa perampokan bersenjata ini dihitung sebagai ancaman jika terjadi di dalam perairan teritorial atau perairan internal.¹¹⁵

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di mana perampokan dan perompakan ini kerap terjadi. Menurut Laporan Kuartal Pertama dari Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP), pada awal tahun 2023, terdapat 25 insiden perompakan bersenjata terhadap kapal yang dilaporkan di Asia, dengan sebagian besar terjadi di Indonesia, Filipina, dan Selat Malaka serta Singapura (SOMS). Namun sejauh ini tidak ada insiden pembajakan yang dilaporkan dalam periode ini.¹¹⁶ Berikut ini merupakan tabel terkait dengan jumlah kasus perompakan di laut Indonesia pada setiap tahunnya.

Tahun	Jumlah
2015	86 serangan
2016	49 serangan
2017	35 serangan
2018	26 serangan
2019	50 serangan
2020	29 serangan
2021	28 serangan
2022	13 serangan

¹¹⁴Op.cit ReCAAP.

¹¹⁵Op.cit Maritime Global Security.

¹¹⁶ Prakash Panneerselvam & K.G. Ramkumar, *Piracy and Armed Robbery in Southeast Asia: The Need for a Fresh Approach*, diakses dari <https://thediplomat.com/2023/05/piracy-and-armed-robbery-in-southeast-asia-the-need-for-a-fresh-approach/> pada 3 Februari 2024 pukul 16:41.

2023	35 serangan
------	-------------

Tabel 4.1 Jumlah Perompakan di Laut Indonesia tahun 2015-2023
Sumber: Diolah oleh penulis.

Di setiap tahunnya, perompakan di Indonesia mengalami penurunan. Meskipun demikian, Indonesia tetap berada di posisi atas sebagai negara dengan kasus penyerangan bajak laut terbanyak. Perompakan yang terjadi di Indonesia ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua – Asia dan Australia – serta dua samudera – Hindia dan Pasifik – membuat lautan Indonesia menjadi wilayah yang ramai untuk dikunjungi oleh para pedagang di seluruh dunia. Kondisi geografis ini membuat Indonesia mendapatkan keuntungan absolut terutama dalam aktivitas perdagangan. Negara-negara dari Asia Timur akan selalu melewati Selat Malaka atau ALKI untuk melakukan perdagangan ke kawasan Afrika mau pun Timur Tengah. Dengan kondisi seperti ini membuat rentannya terjadi perampokan juga perompakan bersenjata di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi keanggotaan ReCAAP.¹¹⁷

Perampokan dan perompakan bersenjata ini merupakan salah satu ancaman yang bisa menghadirkan ancaman lain, seperti misalnya rasa tidak aman bagi kapal-kapal untuk melewati perairan Indonesia atau pun penyuplaian senjata kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan juga penyalahgunaan senjata yang mungkin digunakan oleh kelompok radikal, dan akan mengganggu keamanan dan juga kedaulatan NKRI. Maka dari itu, karena Indonesia belum meratifikasi

¹¹⁷ Achmad Ismail, 2021, *Indonesia's Policy in Delaying the Ratification of Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) 2006 – 2019*, Indonesian Journal of Peace and Security Studies, Vol. 3, No. 1, hal. 1-13.

keanggotaan ReCAAP, Indonesia harus mengatasi permasalahan perompakan dan perampokan bersenjata ini untuk mempertahankan keamanan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perairan.

3.2.2 Ancaman Tindakan – Tindakan Terorisme di Perairan Indonesia

Istilah terorisme semakin mencuat ketika adanya insiden 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat. Serangan yang kemudian dikenal sebagai 9/11 ini menewaskan hampir tiga ribu orang Amerika Serikat ketika teroris yang menggunakan pesawat yang dibajak menyerang lokasi-lokasi pemerintahan dan bisnis utama di New York dan Washington D.C., yang menyebabkan serangan teror paling mematikan dalam sejarah. Sejak itu, istilah terorisme semakin digaungkan dan menjadi momok yang menakutkan bagi negara-negara di seluruh dunia. Terorisme sendiri merupakan sebuah istilah yang sarat akan makna, di mana menimbulkan rasa takut dan kebingungan. Definisi terorisme berbeda di seluruh dunia. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, terorisme didefinisikan sebagai “Tindakan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk memajukan tujuan ideologis yang berasal dari pengaruh dalam negeri, seperti yang bersifat politis, agama, sosial, rasial, atau lingkungan.”¹¹⁸

Tindakan terorisme ini juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia, mengingat cukup banyaknya aktivitas teroris yang berlangsung di wilayah Indonesia, di mana tindakan ini menyebabkan ancaman keamanan bagi NKRI.

¹¹⁸ Council on Foreign Relations, *What is Terrorism?*, di akses dari <https://world101.cfr.org/global-era-issues/terrorism/what-terrorism> pada 3 Februari 2024 pukul 18:42.

Indonesia sendiri memiliki pasal terkait dengan terorisme ini, sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Pasal 6, “Terorisme merupakan tindakan yang mengandung unsur pelaku kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, korban kecelakaan, dan juga kerusakan objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.” Sejarah terorisme di Indonesia berlangsung dengan cukup panjang, di mana Indonesia juga pernah menjadi terorisme negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.¹¹⁹

Pada awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2000, terdapat empat aksi terorisme di Indonesia yang menyita perhatian publik juga dunia. Aksi pertama pada 1 Agustus 2000, yang mana aksi terorisme ini dilakukan di Kedutaan besar Filipina dengan melakukan pengeboman dan terjadi di depan rumah Duta Besar Filipina. Tindakan ini membuat tewasnya 2 orang dan 21 orang dalam keadaan luka-luka. Aksi terorisme yang kedua terjadi pada 27 Agustus 2000, di mana adanya ledakan granat di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Aksi yang ketiga merupakan sebuah pengeboman yang terjadi di area parkir Gedung Bursa Efek Jakarta pada 13 September 2000, di mana insiden ini menelan 10 korban jiwa, dan 90 orang terluka. Aksi terorisme yang keempat terjadi pada malam natal, yakni 24 Desember 2000 dan terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti Medan, Bandung, Batam, Sukabumi, Bekasi, Mojokerto, dan Jakarta.¹²⁰

¹¹⁹Yunita Prananda Maulida, 2017, *The History of Terrorism in Indonesia and Efforts to Prevent Terrorism in Indonesia*, Jurnal Scientia Indonesia, Vol. 3, No. 2, hal. 85-104.

¹²⁰ Ibid.

Aksi terorisme di Indonesia sudah terjadi lebih dulu dari sebelum adanya insiden 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan sejak lama serta mengetahui bahwa tindakan terorisme merupakan ancaman bagi keamanan negara. Aksi terorisme pada tahun 2000 merupakan sebagian kecil dari aktivitas grup teroris di Indonesia. Terorisme termasuk ke dalam ancaman maritim non-tradisional karena adanya kelompok teroris yang mampu melakukan aksi terorisme maritim. Di Indonesia, lebih tepatnya di Laut Sulu-Sulawesi, merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan terorisme maritim ini. Adanya aktivitas kriminal lintas negara di Laut Sulu-Sulawesi menjadi kendala tersendiri bagi kelompok-kelompok kepentingan di wilayah tersebut. Kejahatan di laut ini bisa sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, utamanya aktivitas terorisme. Kejahatan terorisme sendiri merupakan kejahatan yang paling banyak disorot di Indonesia sejak terjadinya terror bom Bali dan serangkaian aksi terorisme di Indonesia.¹²¹

Kelompok teroris yang paling terkenal dan menakutkan adalah kelompok Abu Sayyaf Group (ASG). Kelompok ASG ini sering melakukan aksi terorisme seperti melakukan penyerangan, pembajakan kapal, penculikan, pemenggalan kepala, pengeboman dan lain-lain. Kelompok ini tidak segan-segan memenggal kepala para sandera. Kelompok Abu Sayyaf ini tidak hanya aktif melakukan

¹²¹Parista Maolana & Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 2023, *Unraveling the Depths: Exploring Maritime Terrorism through International and National Legal Perspective*, Journal of Judicial Review, Vol. 25, No. 1, Hal. 159-174.

kekerasan dan penculikan di Filipina saja, melainkan juga di negara tetangga seperti di Indonesia.¹²²

Dengan posisi Asia Tenggara yang rentan terhadap kelompok terorisme serta banyaknya aksi terorisme yang terjadi membuat Indonesia menjadi sangat serius di dalam mengatasi permasalahan ini. Posisi geografis Indonesia memang membawa keuntungan ekonomi, namun di sisi lain, posisi geografis Indonesia seakan-akan menjadi jalan masuk bagi aktivitas kejahatan seperti terorisme. Posisi Indonesia yang berbatasan dengan berbagai negara membuat kelompok teroris tidak susah untuk menyelundup masuk ke wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang minim dengan penjagaan. Sulawesi telah menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dunia karena kemunculan organisasi teroris seperti ASG dan Jemaah Islamiyah.¹²³

Tindakan-tindakan terorisme, terutama terorisme maritim telah menjadi salah satu ancaman keamanan yang mendapatkan perhatian yang tinggi dari Pemerintah Indonesia mengingat banyaknya aksi tindakan terorisme yang terjadi dan kondisi geografis Indonesia yang memudahkan penyusup-penyusup asing untuk masuk dan membuat kekacauan di wilayah NKRI. Menilik ke sejarah terorisme dan bagaimana Sulawesi telah menarik perhatian dunia karena kemunculan organisasi teroris melewati wilayah ini, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia sangat memperhatikan tindakan terorisme ini. Akan semakin mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia jika tindakan terorisme

¹²² Ibid.

¹²³ Herdi Sahrasad, et. al., 2018, *Maritime Terrorism Network: Threat and Security in Contemporary Southeast Asia*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 26, No. 1, Hal. 115-146.

ini bertujuan untuk melakukan gerakan separatisme dan memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2.3 Ancaman Penyelundupan Senjata dan Senjata Pemusnah Massal di Perairan Indonesia

Ketika Indonesia mengalami transisi demokrasi pada tahun 1998, kondisi keamanan Indonesia belum bisa dikatakan telah sepenuhnya stabil dan aman. Konflik-konflik lokal masih mudah muncul, di mana hal ini tidak hanya menjadi tolak ukur dari aman atau tidaknya kondisi negara, melainkan juga menjadi tolak ukur atas banyaknya senjata ilegal yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan tingginya potensi konflik yang terjadi di wilayah Indonesia membuat penyelundupan senjata ke wilayah Indonesia semakin beragam. Pada dekade sebelumnya, senjata api yang marak digunakan adalah senjata api laras pendek seperti FN, colt, revolver, dan lain sebagainya. Namun, belakangan ini terjadi perkembangan di dalam penggunaan senjata, di mana berbagai jenis senjata api laras panjang telah digunakan seperti AK-17, AK-47, dan lain sebagainya. Tindakan kejahatan teroris yang marak di Indonesia juga menggunakan senjata api laras panjang ini, sehingga penggabungan ancaman tindakan terorisme dan penyelundupan senjata merupakan kombo yang mengancam keamanan Indonesia.¹²⁴

Seperti misalnya, penyelundupan senjata yang terjadi melalui Provinsi Sumatera Utara, seperti AK-47 dan SS-1 yang digunakan oleh jaringan terorisme

¹²⁴Poltak Partogi Nainggolan, 2016, *Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia*, Kajian, Vol. 16, No. 4, hal. 793-820.

yang berasal dari daerah bekas konflik separatist Aceh diduga diselundupkan dari negara tetangga. Sebagian besar senjata yang dimiliki oleh jejaring teroris atau kelompok yang bermasalah berasal dari tindakan penyelundupan, di mana senjata didapatkan dari negara lain yang kemudian diselundupkan ke Indonesia. Seperti misalnya, melalui penggerebekan kamp pelatihan terorisme di Lamkabeu, Aceh, didapatkan sejumlah senjata yang berasal dari Filipina Selatan. Jalur perairan yang lebih aman selalu dipilih oleh para penyelundup untuk menyelundupkan senjata ke wilayah Indonesia, utamanya dari jalur perairan sekitar Filipina yang rawan dan kemudian disalurkan ke jalur perairan Indonesia yang memiliki pengawasan tidak terlalu ketat dengan menggunakan perahu-perahu nelayan lokal, dan dapat membuang senjata ke laut ketika kepergok oleh aparat keamanan Indonesia.¹²⁵

Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang sedang memiliki konflik panas, sehingga tak jarang banyak senjata yang diselundupkan ke wilayah tersebut. Seperti misalnya, ketika Polda Sulawesi Utara meringkus dua tersangka penyelundupan senjata api dan amunisi ilegal dari Filipina ke Indonesia yang nantinya akan diselundupkan ke Papua.¹²⁶

Di momen lain, TNI juga menggagalkan penyelundupan senjata api yang diduga akan dikirim ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua Pegunungan. Senjata yang disita ialah senjata laras panjang jenis M4 dan AR 15 yang disita, di mana menurut TNI senjata ini sangat berbahaya karena termasuk ke

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ CNN Indonesia, *Polisi Gagalkan Penyelundupan Senjata dari Filipina ke Papua*, di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220520195715-12-799255/polisi-gagalkan-penyelundupan-senjata-dari-filipina-ke-papua> pada 4 Februari 2024 pukul 15:23.

dalam senjata serbu generasi baru yang akan digunakan oleh KKB untuk membuat kekacauan di Kenyam, Nduga. KKB sendiri merupakan sebutan aparat terhadap kelompok milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jika senjata tersebut sampai ke KKB, maka penyerangan terhadap aparat keamanan dan masyarakat mungkin tak akan terelakkan lagi.¹²⁷ Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah penyelundupan senjata ke wilayah Indonesia.

Tahun	Jumlah
2015	723 senjata api
2016	1.319 senjata api/205 kasus
2017	328 kasus
2018	136 kasus
2019	-
2020	12 kasus
2021	18 kasus
2022	4 kasus
2023	43 kasus

Tabel 3.1 Jumlah Penyelundupan Senjata Api Ilegal di Indonesia tahun 2015-2023.
Sumber: Diolah oleh penulis.

¹²⁷ CNN Indonesia, *TNI Gagal Penyelundupan Senjata Api, Diduga Bakal Dikirim ke Nduga*, di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231120074102-12-1026396/tni-gagalkan-penyelundupan-senjata-api-diduga-bakal-dikirim-ke-nduga> pada 4 Februari 15:27.

Dengan konflik-konflik lokal yang masih terjadi di Indonesia serta kondisi perairan Indonesia yang mendukung untuk melakukan penyelundupan membuat banyaknya oknum yang menyelundupkan berbagai macam hal ke wilayah perairan Indonesia, salah satunya adalah senjata api dan senjata pemusnah massal. Jika penyelundupan senjata ini terus dilakukan membuat semakin banyaknya senjata yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia dan membuat tingginya tingkat ancaman keamanan negara. Penyelundupan senjata ini ditujukan untuk penyalahgunaan penggunaan, di mana pada akhirnya akan memakan banyak korban dan menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat Indonesia.

3.2.4 Ancaman Penyelundupan Obat-obatan Terlarang di Perairan Indonesia

Penyelundupan obat-obatan terlarang merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi seluruh negara. Pasalnya, penyelundupan obat-obatan ini dilakukan dengan sangat masif dan dengan jumlah yang sangat besar untuk kemudian diedarkan di dalam negeri. Indonesia, sebagai salah satu negara yang melarang pengedaran obat-obatan terlarang secara umum tentu saja menganggap penyelundupan obat-obatan ini sebagai ancaman karena dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. Namun, sebagaimana yang diketahui, kondisi geografis Indonesia membuat Indonesia kesulitan di dalam mengatasi penyelundupan obat-obatan terlarang ini karena ada banyaknya jalur yang bisa ditempuh untuk menyelundupkan barang ilegal.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri semakin mengkhawatirkan, di mana Badan Narkotika Nasional¹²⁸ pada tahun 2022 melaporkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada tahun 2021 ini adalah 1,95%. Hal yang membuat penyelundupan obat-obatan ini semakin rumit ialah karena penyelundupan dan peredarannya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah terorganisir dan termasuk ke dalam TOC atau *transnational organization crime*. Kejahatan TOC ini sendiri merupakan sebuah fenomena di dunia internasional karena kegiatannya melanggar hukum beberapa negara dan memiliki efek domino kepada negara lain.¹²⁹

Dengan kondisi geografis Indonesia yang mendukung di mana mayoritas wilayah Indonesia adalah lautan, maka hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para sindikat untuk menggunakan jalur laut Indonesia dalam penyelundupan obat-obatan terlarang, baik itu ke dalam negeri mau pun ke luar negeri. Sehingga, penyeludupan barang ilegal ke Indonesia ini 80% melalui jalur laut. Jalur laut dipilih karena pengawasannya tidak seketat jika melewati jalur udara dan banyaknya jalur-jalur tikus yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya tiga jaringan narkoba terbesar di Asia Tenggara seperti The Golden Triangle yang meliputi Thailand, Myanmar dan Laos, The Golden Crescent yang meliputi Afghanistan, Pakistan, dan Iran, dan juga The Golden Peacock, yang berasal dari Amerika Latin. Belum lagi

¹²⁸ Badan Narkotika Nasional, 2022, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*, Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional.

¹²⁹ Rudi Hartono & Bakharuddin, 2023, *Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Laut di Indonesia*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 2, No. 8, Hal. 809-820.

adanya negara tambahan seperti Vietnam dan Kamboja yang juga memiliki banyak produsen atau pabrik narkoba ilegal.¹³⁰



Gambar 3.1 Pola Peredaran Gelap Narkoba Melalui Jalur Laut Indonesia
Sumber: Musren BNN 2023

Jika melihat pola peredaran pada gambar 3.1, terdapat beberapa daerah dengan kerawanan yang tinggi, di mana daerah-daerah tersebut dipilih sebagai jalur masuk narkoba ilegal. Pulau Sumatera menjadi salah satu wilayah yang rawan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah di Pulau Sumatera ini menjadi salah satu jalur yang cukup sering digunakan oleh para sindikat di mana obat-obatan terlarang dikirim dari Taiwan dan Tiongkok menuju Malaysia kemudian ke wilayah Indonesia. Jalur lainnya terdapat jalur Pasifik, yang berada di wilayah tengah Indonesia. Dari Laut Tiongkok Selatan dan Filipina kemudian diselundupkan ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku.¹³¹

¹³⁰Lemhannas, *Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut*, di akses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut> pada 4 Februari 2024 pukul 13:02.

¹³¹Op.cit Hartono & Bakharuddin, hal. 814.

BNN mengeluarkan pernyataan mengenai laut mana saja yang menjadi wilayah rawan akan penyelundupan barang ilegal di Indonesia. Salah satunya adalah Laut Arafuru yang terletak di Papua, di mana laut ini termasuk salah satu dari delapan wilayah yang rawan untuk melakukan tindakan ilegal tersebut. Dikatakan bahwa 95% sabu diselundupkan melalui laut sebelum kemudian diedarkan ke berbagai wilayah lainnya.¹³² Jalur laut masih menjadi jalur yang digemari, di mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya penangkapan dan penggalan penyelundupan obat-obatan terlarang di wilayah perairan Indonesia. Seperti misalnya, pada 2023 silam, ketika tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut (TNI AL) di Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan 5 Kg sabu-sabu di Teluk Lencah, atau ketika tim *Second Fleet Quick Response* (SFQR) Lantamal XIII Tarakan, BNN Tarakan dan Bea Cukai Tarakan berhasil menangkap pelaku penyelundupan narkoba yang membawa 15 Kg sabu-sabu di Pulau Keciak, Kalimantan Utara.¹³³

Tak hanya penggalan dengan jumlah skala kecil saja yang berhasil, melainkan juga dalam skala besar. Seperti penggalan penyelundupan yang dilakukan oleh Patroli Rasta Gabungan (PRG) pada Januari hingga Februari 2023. PRG sendiri merupakan patroli laut pemberantasan peredaran gelap narkoba, di

¹³²Juhra Nasir, *BNN Ungkap Laut Arafuru Masuk Daftar Perairan Rawan Penyelundupan Narkoba*, di akses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6734154/bnn-ungkap-laut-arafuru-masuk-daftar-perairan-rawan-penyelundupan-narkoba> pada 4 Februari pukul 13:08.

¹³³ TNI, *TNI AL Kembali Berhasil Tangkap Penyelundupan 15 Kg Sabu-Sabu Asal Malaysia*, di akses dari <https://tni.mil.id/view-231345-tni-al-kembali-berhasil-tangkap-penyelundupan-15-kg-sabu-sabu-asal-malaysia.html> pada 4 Februari pukul 13:20.

mana PRG ini berhasil menggagalkan penyelundupan sabu sebesar 309 Kg dari sindikat The Golden Crescent.¹³⁴

Penyelundupan narkoba ini menjadi tindakan kriminal yang semakin mengkhawatirkan bagi laut Indonesia, karena tindakan ini memiliki potensi untuk memicu konflik dengan negara tetangga karena adanya transaksi yang berlangsung secara transnasional.¹³⁵ Kerentanan wilayah laut Indonesia yang luas membuat banyaknya ancaman yang menghampiri wilayah Indonesia, salah satunya adalah penyelundupan obat-obatan terlarang ini.

Penyelundupan obat-obatan terlarang ini tidak hanya berbahaya bagi sumber daya manusia Indonesia saja, melainkan juga bisa berbahaya bagi kondisi bilateral Indonesia dengan negara tetangga. Potensi konflik yang mungkin terjadi akibat penyelundupan barang ilegal ini sangat mungkin untuk terjadi. Jika konflik ini benar-benar terjadi, maka hanya akan merugikan Indonesia karena Indonesia akan dipandang buruk di mata dunia internasional dan dianggap sebagai negara yang menjadi alasan tersebarnya narkoba di berbagai negara karena posisi Indonesia yang berdekatan dengan banyak negara dan jalur-jalur Indonesia yang dapat ditempuh untuk menuju ke negara lain. Maka dari itu, penyelundupan obat-obatan terlarang ini juga salah satu prioritas teratas bagi keamanan Indonesia, utamanya di wilayah laut karena jalur laut merupakan jalur favorit bagi para sindikat untuk menyelundupkan barang-barang ilegal tersebut.

¹³⁴ Humas BNN, *Operasi PRG Gagalkan Penyelundupan 309 Kg Sabu Jaringan Golden Crescent*, di akses dari <https://bnn.go.id/operasi-prg-gagalkan-penyelundupan-309-kg-sabu-jaringan/> pada 4 Februari 2024 pukul 13:51.

¹³⁵Op.cit Hartono & Bakharuddin, hal. 811.

3.2.5 Ancaman Penyelundupan dan Perdagangan Manusia Lewat Laut

Dalam beberapa waktu terakhir ini, perdagangan manusia telah menarik perhatian negara di seluruh dunia, di mana perdagangan manusia ini termasuk ke dalam permasalahan modern yang memiliki sifat penindasan, di mana tindakan ini dimaksudkan untuk aksi penyalahgunaan manusia baik perorangan atau pun lebih. Perdagangan manusia sendiri termasuk ke dalam salah satu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Perdagangan manusia menurut PBB sendiri diartikan sebagai “*Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*”¹³⁶

Perdagangan manusia di Indonesia sendiri merupakan salah satu fenomena yang telah berulang kali terjadi dan memakan banyak sekali korban. Di dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara pertama yang menempati posisi dengan kasus perdagangan manusia tertinggi. Menurut data dari IOM, dari tahun 2005 sampai 2014, tercatat sudah ada 6.651 korban jiwa, di mana 82% dari korban ini merupakan wanita yang dipekerjakan baik secara domestik mau pun

¹³⁶ Niken Septia Mardani Suhenri Putri, Arin Fithriana, & Denada Faraswacyen L. Gaol, 2022, *Upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam Menangani Kasus Kejahatan Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2019*, JOM Fisip, hal. 23-32.

lintas negara. Perdagangan manusia ini telah memasuki bahaya pada zona merah di Indonesia karena tingginya kasus yang ada. Daerah-daerah yang tinggi akan perdagangan manusia merupakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.¹³⁷

Penyebab dari tingginya perdagangan manusia ini disebabkan oleh keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan pada akhirnya mengantarkan kepada jurang eksploitasi komersial, di mana perdagangan manusia ini termasuk ke dalam perbudakan modern. Target dari perdagangan manusia ini adalah perempuan dan anak-anak yang merupakan kaum rentan.¹³⁸

Proses perdagangan manusia ini kerap kali menggunakan jalur perairan yang minim dengan pengecekan identitas dan juga minim dengan penjagaan. Perdagangan manusia ini, pada akhirnya mengundang efek domino bagi keamanan Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Dengan tingginya angka perdagangan manusia, setidaknya terdapat tiga prinsip keamanan nasional yang terancam, yakni kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.¹³⁹

Indonesia sendiri berada di dalam keadaan darurat terkait dengan fenomena perdagangan manusia ini. Tidak sedikit migran yang mengalami nasib naas ketika menjadi korban dari perdagangan manusia, dan tidak sedikit pula korban yang

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Cahya Wulandari & Sonny SaptioajieWicaksono, 2014, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, Yustisia, No. 90, hal. 15-26.

¹³⁹ Anggie Pratiwi Putri Yunda, 2020, *Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Selat Malaka*, Padjajaran Journal of International Relations, Vol. 1, No. 3, hal. 177-201.

ditemukan dengan keadaan tewas akibat tindakan perbudakan modern ini.¹⁴⁰ Dengan banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban dari penyelundupan dan perdagangan manusia ini membuat Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Selain itu juga, Indonesia turut wajib untuk bertanggung jawab atas keamanan laut, sehingga perairan Indonesia tidak lagi menjadi tempat untuk menyelundupkan manusia, baik itu ke dalam wilayah Indonesia mau pun keluar.¹⁴¹

Penyelundupan dan perdagangan manusia yang terjadi di perairan Indonesia ini tidak hanya mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI saja, melainkan juga memberikan ancaman kepada negara sekitar. Tak hanya itu, Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sehingga tidak menjadi korban dari penyelundupan dan perdagangan manusia ini serta berkewajiban untuk menyelamatkan mereka yang telah terjerat di dalam perbudakan modern ini. Perairan Indonesia yang dekat dengan berbagai negara juga tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat tingginya kasus perdagangan manusia. Indonesia perlu berusaha lebih ekstra untuk mengatasi penyelundupan dan perdagangan manusia ini, utamanya meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia sehingga para oknum tidak lagi mendapatkan kemudahan untuk menyelundupkan dan memperdagangkan manusia melalui jalur perairan.

¹⁴⁰Leonard Triyono, *AktivisSebut Indonesia Berada dalam Keadaan DaruratPerdagangan Orang*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-sebut-indonesia-berada-dalam-keadaan-darurat-perdagangan-orang-/7164822.html> pada 5 Februari pukul 17:24.

¹⁴¹Op.cit Yunda, hal. 179.

3.2.6 *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing merupakan tindakan penangkapan ilegal dan tidak sesuai aturan. IUUF ini sendiri ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu dari tujuh kejahatan maritim di dunia. Di dalam IUUF sendiri terdapat tiga kategori penangkapan ikan, yakni, “(1) *illegal fishing*, di mana ini merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; (2) *unreported fishing*, merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapan dengan benar kepada instansi yang bertanggung jawab. Selain itu juga, penangkapan dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, dan; (3) *unregulated fishing*, merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.”¹⁴²

Merujuk kepada keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), terdapat 12 modus IUUF yang banyak ditemukan di perairan Indonesia, di antaranya adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi dan bendera ganda, menangkap ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal – seperti mengecilkan ukuran kapal –, menggunakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing, tidak mengaktifkan *Vessel Monitoring*

¹⁴²Econusa, *IUU Fishing itu Apa Sih? Yuk Cari Tahu Lebih Lanjut*, di akses dari <https://econusa.id/id/ecodefender/artikel-stc/iuu-fishing-itu-apa-sih-yuk-cari-tahu-lebih-lanjut/> pada 5 Februari 2024 pukul 17:37.

System (VSM) atau *Automatic Identification System* (AIS), alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data *logbook* (pelaporan penangkapan ikan), menangkap ikan di luar jalur penangkapan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin.¹⁴³

IUUF ini terjadi di perairan Indonesia karena kekayaan sumber daya laut yang dimiliki oleh perairan Indonesia. Tindakan IUUF ini sendiri marak terjadi di Indonesia, seperti misalnya di Laut Natuna Utara, selama bulan Mei 2022, dilaporkan sekitar 60 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal.¹⁴⁴ Penangkapan ikan ilegal ini hanya sebagian kecil dari rangkaian kasus IUUF yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya IUUF ini membuat Indonesia tidak bisa memaksimalkan potensi kekayaan lautnya dan pada akhirnya berdampak kepada kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Diperkirakan kerugian yang ditanggung oleh Indonesia akibat adanya IUUF ini sekitar 20 juta dollar AS setiap tahunnya.¹⁴⁵

Tahun	Jumlah
2015	108 kasus
2016	163 kasus
2017	132 kasus

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ocean Justice Initiative, *Ancaman IUUF di Indonesia Maret – Juni 2022*, di akses dari <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/> pada 5 Februari 2024 pukul 17:43.

¹⁴⁵ M. Rizqi Isnuardi, 2017, *Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*, Jurnal Hubungan Internasional, No. 2, hal. 118-132.

2018	109 kasus
2019	107 kasus
2020	88 kasus
2021	82 kasus
2022	83 kasus
2023	269 kasus

Tabel 3.2 Data Tangkapan Pelaku UUF
Sumber: Diolah oleh penulis.

Jika merujuk kepada gambar 3.3, penangkapan kapal dari tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis, meskipun di tahun 2023 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Namun, angka tersebut masih terbilang besar bagi Indonesia dan membuat Indonesia terus merugi karena masifnya kegiatan IUUF yang berlangsung di perairan Indonesia. Berdasarkan gambar 3.3, dapat diketahui bahwa mayoritas negara yang melakukan IUUF berasal dari Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Daerah yang rawan akan IUUF ini sendiri cukup banyak, di antaranya Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, hingga Laut Arafura. Tingginya potensi sumber daya ikan Indonesia menjadi daya tarik bagi nelayan di negara lain untuk melakukan IUUF. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah aktif melakukan tindakan untuk memerangi dan memberantas IUUF, seperti misalnya menenggelamkan kapal di era Menteri Susi Pudjiastuti.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Dida Daniarsyah, Lucky Rizky Rachmadi, & Ipah Ema Jumiati, 2021, *Efektivitas Program Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) Menuju Legal, Reported, Regulated Fishing (LRRF)*, Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 5, No. 2, hal. 110-122.

Permasalahan IUUF masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas tindakan IUUF ini. Hanya saja, belum ada hasil yang signifikan di dalam jumlah pengurangan atau bahkan pemberantasan IUUF ini. Sehingga, IUUF ini masih menjadi momok bagi para nelayan dan juga menghambat kesejahteraan para nelayan. Selain itu juga secara konstan menempatkan Indonesia di posisi yang merugi karena kekayaan sumber daya ikannya tidak bisa dimaksimalkan mengingat banyaknya tindakan IUUF yang terjadi. Hal ini kemudian menjadi ancaman bagi keamanan laut Indonesia karena membiarkan warga negara asing melakukan aktivitas di perairan Indonesia, yang pada akhirnya membawa kerugian bagi Indonesia.

3.2.7 Perusakan Terhadap Lingkungan Laut yang Disengaja

Kerusakan laut merupakan salah satu kondisi yang tengah dihadapi oleh berbagai negara di dunia saat ini. Kerusakan laut ini sendiri bisa terjadi dengan disengaja atau tidak. Namun, sebagian besar kerusakan laut terjadi karena tindakan yang disengaja oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan laut ini, pada akhirnya akan menghadirkan kerugian juga ancaman baru terhadap negara. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari laut, sehingga kerusakan lingkungan laut akan berdampak kepada kesejahteraan mereka yang menggantungkan kehidupannya kepada laut.

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan mengenai kerusakan laut ini, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yakni “masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.”¹⁴⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai IUUF pada pembahasan sebelumnya, hal itu ternyata memberikan dampak kepada lingkungan, seperti terjadinya perusakan lingkungan laut yang dilakukan dengan sengaja. Dengan maraknya keberadaan kapal-kapal asing tanpa izin yang kerap mencuri dan mengeksploitasi perairan di Indonesia menyebabkan terjadinya *overfishing* atau penangkapan ikan yang berlebihan. Beberapa contoh penangkapan ikan yang berlebihan terjadi di Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timur terhadap ikan tuna, cakalang, tongkol, kembung, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting, dan ranjungan. Kemudian, di Laut Jawa penangkapan ikan berlebihan terjadi pada jenis ikan tuna, lobster, dan cumi-cumi. Dengan penangkapan ikan ini mengakibatkan anjloknya penangkapan ikan di perairan Indonesia, selain itu juga terjadi kelangkaan terhadap biota laut.¹⁴⁸

Perusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja salah satunya disebabkan oleh nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi ekosistem laut. Penggunaan bom ini tidak hanya membuat ikan-ikan kecil mati, melainkan juga merusak terumbu karang,

¹⁴⁷Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *STOP!!! Pencemaran Laut Indonesia*, diakses dari <https://setkab.go.id/stop-pencemaran-laut-indonesia/> pada 8 Februari 2024 pukul 18:41.

¹⁴⁸Op.citIsnurhadi, hal. 119-120.

apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh.¹⁴⁹ Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau, cantrang, dan penggunaan bahan peledak, serta pembuangan zat kimia ke lingkungan laut telah mengakibatkan degradasi lingkungan serta menghadirkan sebuah efek domino, di mana telah menghilangkan mata pencaharian nelayan tangkap dan juga pedagang ikan.¹⁵⁰

Perusakan lingkungan laut ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut, di mana ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan laut serta kekayaan laut Indonesia.¹⁵¹ Selain itu juga bisa disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap lingkungan laut, yang mana oknum seperti ini patut mendapatkan hukuman supaya tidak mengulangi tindakannya yang bisa merugikan banyak pihak dan negara ini.

Perusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja akan mendatangkan banyak permasalahan bagi Indonesia jika tidak segera ditangani. Dampaknya tidak hanya datang dari segi ekonomi saja, melainkan juga keamanan di mana akan mengancam keamanan dari wilayah-wilayah yang dekat dengan perairan. Dari seluruh penjabaran yang telah dikemukakan, terdapat banyak sekali ancaman maritim di perairan Indonesia yang harus diatasi supaya tidak menghasilkan efek

¹⁴⁹Fitri Lestari, *Tingkat Kerusakan Laut di Indonesia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Konvensi Hukum Laut 1982*, Gama Keadilan Edisi Jurnal, hal. 76-87.

¹⁵⁰Op.cit Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

¹⁵¹ Ibid.

domino seperti mengancam keamanan dan kedaulatan dari NKRI. Ancaman-ancaman maritim ini bisa diatasi oleh Pemerintah Indonesia sendiri, atau pun bekerja sama dengan pihak atau negara lain sehingga dapat memaksimalkan usaha meminimalisir kerusakan yang terjadi karena ancaman maritim, baik itu ancaman yang bersifat tradisional mau pun non-tradisional.

